



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



MODUL 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN BENCANA

Mata Kuliah: Manajemen Bencana

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN,
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA,
YOGYAKARTA, INDONESIA

Mata Kuliah : Praktik Manajemen Bencana

Kode Mata Kuliah : RMIN 401

Tanggal Mulai : 18 Januari 2022

KONSEP DASAR MANAJEMEN

Modul: 1



**Abdul Hadi Kadarusno
Maryana
Achmad Husein**

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Kata Pengantar

Laboratorium pendidikan adalah unit kerja pendidikan yang menyediakan fasilitas dan peralatan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Laboratorium pendidikan juga berfungsi sebagai fasilitas penunjang mahasiswa dalam mengembangkan keahlian dan menciptakan karya ilmiah. Kegiatan praktikum pada suatu mata kuliah, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan, kemampuan, dan penemuan. Karena itu perlu dibuat Modul Praktik Manajemen Bencana dalam rangka mendukung hal tersebut.

Melalui modul praktik ini mahasiswa dapat memperoleh materi dan soal latihan tentang konsep dasar manajemen bencana, pada mata kuliah Praktik Manajemen Bencana. Dengan demikian diharapkan tidak ada mahasiswa yang terkendala dalam mengikuti praktik laboratorium.

Besar harapan kami, modul ini dapat bermanfaat dalam memperlancar proses kegiatan praktik mahasiswa. Serta kami menerima kritik dan saran jika terdapat hal-hal yang belum sempurna, agar modul ini dapat digunakan dengan baik di kalangan mahasiswa maupun kalangan instruktur praktik.

Yogyakarta, 14 Januari
2022

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
1. Pengantar	4
2. Capaian Pembelajaran	4
3. Bahan Kajian	4
4. Tujuan Pembelajaran	4
5. Luaran	5
6. Konsep Dasar Bencana	6
7. Manajemen Kedaruratan	10
8. Sistem Komando Pengendalian Lapangan	10
9. Jenis Bencana	15
10. Penugasan	21
11. Referensi	24

1. Pengantar

Mata kuliah ini memuat materi Konsep Dasar Bencana. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang mendukung untuk mencapai kompetensi. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Modul Praktik Manajemen Bencana Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan serta acuan bagi mahasiswa dan instruktur praktik, dalam melaksanakan kegiatan praktikum selama Semester Genap di Prodi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022. Modul praktik ini berisi tentang materi Konsep Dasar Manajemen Bencana.

2. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami tentang konsep dasar manajemen bencana.

3. Bahan Kajian

- a. Konsep Dasar Bencana.
- b. Manajemen Kedaruratan.
- c. Sistem komando pengendalian lapangan.
- d. Jenis bencana.
- e. Pandangan Konvensional bencana.
- f. Paradigma bencana.

4. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami tentang Konsep Manajemen Bencana

- a. Peserta didik mampu memahami tentang Konsep dasar manajemen bencana.
- b. Peserta didik mampu memahami tentang Manajemen Kedaruratan.
- c. Peserta didik mampu memahami tentang Sistem komando pengendalian lapangan.
- d. Peserta didik mampu memahami tentang Jenis bencana.
- e. Peserta didik mampu memahami tentang Pandangan Konvensional bencana
- f. Peserta didik mampu memahami tentang paradigma bencana.

5. Luaran

- a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Konsep dasar manajemen bencana.
- b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Manajemen Kedaruratan.
- c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam melakukan praktik Sistem komando pengendalian lapangan.
- d. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Jenis bencana.
- e. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Pandangan Konvensional bencana
- f. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan paradigma bencana.

6. Konsep Dasar Bencana

a. Konsep dasar bencana

a. Bencana Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

(Anonim, 2007; Anonim, 2008). Menurut Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam WHO – ICN (2009) bencana adalah sebuah peristiwa, bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Meskipun sering disebabkan oleh alam, bencana dapat pula berasal dari manusia.

Adapun definisi bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

b. Bahaya (Hazards)

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (Anonim, 2007). Bumi secara alami mengalami perubahan secara dinamis untuk mencapai keseimbangan. Proses perubahan ini dipandang sebagai potensi ancaman bahaya bagi manusia yang tinggal di atasnya. Indonesia termasuk yang terletak pada pertemuan tiga lempeng / kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian

Utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo- Australia menunjam ke bawah lempeng

Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api dan sesar atau patahan aktif.

c. Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Anonim, 2007). Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila "bahaya" terjadi pada kondisi yang "rentan". Kerentanan fisik menggambarkan suatu kondisi fisik yang rawan terhadap faktor bahaya tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti (Anonim, 2002; Anonim, 2007):

- persentase kawasan terbangun;
- kepadatan bangunan;
- jaringan listrik

- panjang jalan
- jaringan telekomunikasi
- jaringan PDAM

Jika kawasan terbangun dan kepadatan bangunan tinggi termasuk rentan, sedangkan jaringan listrik, jalan, komunikasi dan PDAM sangat rendah Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya. Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Beberapa indikator kerentanan sosial diantaranya kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, semakin tinggi indikator tersebut maka kerentanan sosialnya makin tinggi.

d. Resiko Bencana (Disaster Risk)

Dalam disiplin penanganan bencana (disaster management), resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada (Anonim, 2007). Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam yang bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan rona muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat.

e. Mitigasi

Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahayautama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard) (Anonim, 2002). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain. Dari indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama (main hazard potency) yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia.



Gambar 1 Sumber : <https://koran-jakarta.com/dahsyat-5-deretan-bencana-alam-yang-paling-mengerikan-di-indonesia-sepanjang-2021>

7. Manajemen Kedaruratan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase nya.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

Hal yang dilakukan dalam tanggap darurat :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

Penanggulangan Bencana

1. Menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya
2. Memerlukan keahlian dan pendekatan' khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

8. Sistem Komando Pengendalian Lapangan

Sistem Komando Pengendalian Lapangan atau SKPL, merupakan konsep penanganan keadaan darurat yang terstandarisasi, dilakukan ditempat kejadian, dan dapat digunakan untuk semua bahaya.

Manfaat SKPL, diantaranya :

- a) Memenuhi tuntutan keadaan darurat dengan berbagai bentuk dan ukurannya.
- b) Memungkinkan personel dari berbagai badan untuk melebur menjadi satu struktur manajemen.
- c) Menyediakan dukungan logistik dan administratif bagi staf operasional.
- d) Efektif secara biaya dengan menghindari duplikasi usaha.

Komponen SKPL

- 1) Bagan organisasi SKPL mencakup Staf Komando berikut ini:
Kepala Komando Pengendalian Lapangan, Petugas Informasi, Petugas Pengaman Keselamatan , and Petugas Penghubung Staf Umum termasuk bagian Operasi, Perencanaan Logistik, dan Keuangan/Administrasi.
- 2) Di dalam Bagian Operasi ada dua Cabang. Yang ada dibawah Cabang adalah Divisi dan Kelompok. Di bawah divisi terdapat Tim Gerak Cepat, atuan Tugas, dan Sumber Daya Tunggal.
- 3) Di dalam Bagian Perencanaan terdapat beberapa unit sebagai berikut: Sumber Daya, Situasi, Demobilisasi, dan Dokumentasi.
- 4) Di dalam Bagian Logistik terdapat dua Cabang: Cabang Layanan dengan Unit Komunikasi, Medis, dan makanan di dalamnya, dan cabang pendukung dengan Unit Penyedia, Fasilitas, dan Dukungan Darat di dalamnya.
- 5) Di dalam Bagian Keuangan/Administrasi terdapat Unit-unit sebagai berikut: Waktu, Pengadaan, Kompensasi/Klaim, dan Biaya.

3. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran. Tujuan sistem komando tanggap darurat bencana adalah agar semua pihak terkait

tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Terbentuknya Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi tahapan yang terdiri dari:

- a) Informasi Kejadian Awal
 - b) Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - c) Penetapan Status/Tingkat Bencana
 - d) Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana
-
- 1) Informasi Kejadian Awal Bencana Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. BNPB dan/atau BPBD melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/ masyarakat di lokasi bencana.
 - 2) Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BNPB dan/atau BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - 3) Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi :
 - a. Kepala BPBD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.
 - b. Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepada Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi
 - c. Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional

- 4) Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :
 - a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
 - c. Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

Tugas Pokok Komando Tanggap Darurat Bencana

1. Melaksanakan pengumpulan informasi dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/ nasional.
2. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana. - Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
3. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat.
4. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota
5. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.



Gambar 2 Sumber : powepoint presentasi KSB poltekkes 1

9. Jenis Bencana

Beragam bencana pernah terjadi di Indonesia. Jenis-jenis bencana di Indonesia dapat disimpulkan secara implisit melalui UU No. 24/2007, yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.

Sedangkan menurut (Amhar dan Darmawan, 2007), terdapat tiga jenis bencana berdasarkan penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bencana Geologis

Bencana geologis terdiri dari:

- 1) *Earthquake* (gempa bumi), yaitu peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Waktu terjadinya gempa bumi tidak bisa diprediksi.
- 2) Tsunami, disebabkan oleh gempabumi di laut dalam kondisi tertentu, selain dapat juga oleh letusan gunung api bawah laut atau jatuhnya asteroid besar ke dalam laut. Kapan tsunami akan menghantam daratan dapat diprediksi sehingga dapat dibuat *Early Warning System* meskipun waktu yang tersisa hanya berkisar 5-20 menit.

- 3) *Volcano*, yaitu aktivitas vulkanik (gunungapi) yang waktu kejadiannya dapat diprediksi dengan baik karena aktivitas gunung api yang selalu dipantau.
- 4) *Landslide* (longsor), waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi namun tanda-tanda tanah yang akan longsor biasanya dapat dideteksi.

b. Bencana Meteorologis

Semua bencana meteorologis saat ini termasuk fenomena alam yang dapat diprediksi cukup baik setelah ada sistem pemantauan yang terpadu dengan stasiun pemantau dan satelit cuaca. Bencana meteorologis juga selalu memiliki interaksi dengan aktivitas manusia (lahan hijau/ lahan resapan air, drainase, pintu air, pompa). Bencana Meteorologis terdiri dari :

- 1) Flood (banjir), yaitu peristiwa ketika debit air (air yang masuk ke suatu tempat dari curah hujan, limpahan atau run-up pasang laut) lebih besar dari kredit air (air yang keluar dari tempat tersebut baik karena meresap ke dalam tanah, diuapkan maupun dibuang ke tempat lain).
- 2) Wave (gelombang laut), yang dapat menyebabkan abrasi.
- 3) Wildfire (kebakaran liar), sebagian dapat disebabkan faktor manusia (pembukaan lahan), namun kebakaran yang meluas hanya dimungkinkan oleh kondisi hutan atau belukar yang kering.
- 4) Drought (kekeringan), yang umumnya diikuti oleh gagal panen.
- 5) Storm (topan).

c. Bencana Anthropogenis

Bencana anthropogenis adalah bencana yang secara langsung muncul karena kesalahan, kesengajaan atau kelalaian manusia yang berakibat luas pada lingkungan. Bencana

anthropogenis misalnya kerusakan industri (contoh kerusakan pabrik kimia di Bhopal atau ledakan PLTN di Chernobyl) atau kecelakaan transportasi (misalnya kebocoran tanker Exxon Valdez di Alaska). Bencana anthropogenis lain yang dapat terjadi misalnya terorisme, sabotase, kerusakan dan konflik sosial.

b. Pandangan Konvensional Bencana

Pandangan konvensional menganggap bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dielakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan. Oleh karenanya, fokus dari pengelolaan bencana dalam pandangan konvensional lebih bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Orientasi dari pandangan konvensional adalah pada pemenuhan kebutuhan darurat berupa pangan, penampungan darurat, kesehatan, dan penanganan krisis.

Tujuannya adalah menekan kerugian, kerusakan dan secepatnya memulihkan keadaan pada kondisi semula. Pandangan yang berkembang selanjutnya adalah paradigma mitigasi, yang tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah-daerah yang rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, serta melakukan tindakantindakan mitigasi, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural.

c. Paradigma Bencana

Perkembangan Paradigma Mitigasi Bencana Dari jaman dulu sampai sekarang ini konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma yang sangat pesat mulai dari paradigma konvensional menuju ke holistic

a. Paradigma Konvensional (Relief & Emergency)

Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju ke holistik. Pandangan konvensional menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan

pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Oleh karena itu pandangan semacam ini disebut dengan 'Paradigma Relief atau Bantuan Darurat' yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan darurat berupa: pangan, penampungan darurat, kesehatan dan pengatasan krisis. Tujuan penanggulangan bencana berdasarkan pandangan ini adalah menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan

b. Paradigma Mitigasi

Paradigma yang berkembang berikutnya adalah "Paradigma Mitigasi", yang tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural (seperti membangun konstruksi) maupun non-struktural seperti penataan ruang, building code dan sebagainya.

c. Paradigma Pembangunan

Penanggulangan bencana berkembang lagi mengarah kepada faktor- faktor kerentanan di dalam masyarakat yang ini disebut dengan "Paradigma Pembangunan". Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dengan program pembangunan. Misalnya melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

d. Paradigma Pengurangan Risiko

Pendekatan ini merupakan perpaduan antara sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan pengurangan resiko bencana. Dalam paradigma ini penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah memandang masyarakat sebagai subyek dan

bukan obyek dari penanggulangan bencana dalam proses pembangunan. Paradigma penanggulangan bencana sudah beralih dari paradigma bantuan darurat menuju ke paradigma mitigasi/preventif dan sekaligus juga paradigma pembangunan. Karena setiap upaya pencegahan dan mitigasi hingga rehabilitasi

e. Paradigma Baru Mitigasi Bencana

Analogi yang mungkin dapat dipandang sebagai tindakan mitigasi bencana adalah pelaksanaan tindakan-tindakan sanitasi lingkungan yang berkembang pada pertengahan abad 19. Sebelum waktu itu berbagai penyakit akibat buruknya sanitasi lingkungan seperti tuberculosis, tipus, kolera, desentri, cacar yang dianggap sebagai epidemik yang meningkat sejalan dengan pembangunan industri dari kota-kota yang memicu meningkatnya konsentrasi konsentrasi populasi. Penyakit-penyakit ini mempunyai pengaruh besar terhadap harapan hidup pada masa itu, tetapi hal tersebut dianggap sebagai bagian dari resiko hidup sehari-hari. Ketidakteraturan serangan penyakit dan sulitnya penyakit tersebut ditebak, menimbulkan pandangan takhayul dan mitologi, sedangkan resiko yang tinggi dari penyakit tersebut diterima saja oleh masyarakat waktu itu karena rendahnya pengetahuan terhadap penyakit tersebut.

Pemenuhan kebutuhan darurat merupakan hal yang sangat vital dalam tanggap darurat. Keberhasilan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan darurat akan mengurangi daya rusak dari bencana dan dampak susulan dari sebuah bencana. Selain itu, efektivitas pemenuhan kebutuhan darurat merupakan tolok ukur bagi kesiapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.

Hambatan-hambatan dalam tanggap darurat yaitu kekurangsiapan atau kegagalan dalam memberikan bantuan, informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan, terputusnya komunikasi dan transportasi

sedangkan pemulihan/fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan, sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas, ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan sedangkan fasilitasi keamanan belum bisa diciptakan secara cepat, hambatan politis dan administratif/birokrasi yang lambat, tidak seimbang kebutuhan/permintaan dari lapangan dan persediaan bantuan, cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan tidak memadai, petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas, ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang. Kajian cepat merupakan pengkajian situasi dan kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana. Kajian cepat diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan melalui suatu respon.

10. Penugasan

a. Tugas 1

- 1) Mahasiswa mengerjakan soal pilihan ganda di bawah ini dengan cara menandai dengan diberi tanda silang pada pilihan yang telah disediakan.
- 2) Pengampu dan mahasiswa mendiskusikan bersama untuk membahas dan mendapatkan jawaban yang benar dan tepat.

Soal pilihan ganda

1) Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya sendiri disebut

A. Wabah

B. KLB (Kejadian Luar Biasa)

C. Bencana

D. Epidemi

E. pandemic Jawaban : (c)

2) Suatu peristiwa dapat disebut sebagai bencana bila

A. Mengancam nyawa

B. Korbannya banyak

C. Dokter tidak ada

D. Stok obat hilang

E. perawat tidak kompeten Jawaban : (a)

3) Bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial termasuk

A. Bencana sosial

B. Bencana alam

C. Bencana teknologi

D. Bencana gagal modernisasi

E. bencana rumah tangga Jawaban : (a)

4) Tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh dari

- A. Bencana sosial
- B. Bencana alam
- C. Bencana teknologi
- D. Bencana gagal modernisasi
- E. bencana budaya Jawaban : (b)

5) Dampak bencana terhadap kesehatan adalah

- A. Jalan utama rusak
- B. Aliran listrik dimatikan
- C. Angka kematian meningkat
- D. Pelayanan kesehatan meningkat
- E. munculnya banyak penyakit infeksi Jawaban : (e)

6) Berikut adalah siklus terjadinya bencana

- A. Pra bencana-saat bencana-pasca bencana
- B. Respon bencana-mitigasi bencana-rekonstruksi bencana
- C. Pencegahan bencana-tanggap darurat bencana-rehabilitasi bencana
- D. Pemulihan bencana-tanggap darurat bencana-kesiapsiagaan bencana
- E. pra bencana-pemulihan-bencana-sosialisasi bencana Jawaban : (a)

7) Tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan pada fase sebelum terjadi bencana disebut...

- A. Pemulihan
- B. Tanggap darura
- C. Kesiapsiagaan
- D. Rekonstruksi
- E. sosialisasi Jawaban : (c)

8) Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dilakukan pada tahap....

- A. Kesiapsiagaan
- B. Pencegahan
- C. Rehabilitasi

D.Rekonstruksi

E.Suplay sumber Daya Jawaban : (b)

9)Upaya perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada

kondisi sama atau lebih baik dilakukan pada fase

A.Mitigasi

B.Recovery

C.Rehabilitasi

D.Rekonstruksi

E.konkluksi Jawaban : (c)

10)Dalam manajemen penanggulangan bencana, kira-kira satu minggu setelah terjadi bencana disebut sebagai fase

A.Sub-akut

B.Akut

C.Respon

D.Tindakan

E. Lanjutan

pencegahan Jawaban : (d)

Penilaian:

Dinilai secara kualitatif dengan *range* nilai dari 0 sampai 100.

11. Referensi

2015. Modul Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

file:///C:/Users/hp/Downloads/BUKUMATERIPEMBELAJARANMANAJEMENG AWATDARURAT diakses pada Kamis, 10 Februari 2022 pukul 20.15.

Modul-Praktikum-Kegawatdaruratan-dan-Manajemen-Bencana-compressed.pdf , diakses pada Kamis, 10 Februari 2022 pukul 20.22.

Keperawatan-GAdar-dan-MANajemen-Bencana-Komprehensif.pdf , diakses pada Kamis, 10 Februari 2022 pukul 20.50.

1. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				
2				
3				

Nilai Akhir: _____

Pengampu,



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



MODUL 2

PRINSIP PENANGANAN BENCANA DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN MITIGASI BENCANA

Mata Kuliah: Manajemen Bencana



PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN,
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA,
YOGYAKARTA, INDONESIA

Mata Kuliah : Praktik Manajemen Bencana

Kode Mata Kuliah : RMIN 401

Tanggal Mulai : 18 Januari 2022

PRINSIP PENANGANAN BENCANA DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN/MITIGASI BENCANA

Modul: 2



Abdul Hadi Kadarusno
Maryana
Achmad Husein

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Kata Pengantar

Laboratorium pendidikan adalah unit kerja pendidikan yang menyediakan fasilitas dan peralatan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Laboratorium pendidikan juga berfungsi sebagai fasilitas penunjang mahasiswa dalam mengembangkan keahlian dan menciptakan karya ilmiah. Kegiatan praktikum pada suatu mata kuliah, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan, kemampuan, dan penemuan. Karena itu perlu dibuat Modul Praktik Manajemen Bencana dalam rangka mendukung hal tersebut.

Melalui modul praktik ini mahasiswa dapat memperoleh materi dan soal latihan tentang konsep dasar manajemen bencana, pada mata kuliah Praktik Manajemen Bencana. Dengan demikian diharapkan tidak ada mahasiswa yang terkendala dalam mengikuti praktik laboratorium.

Besar harapan kami, modul ini dapat bermanfaat dalam memperlancar proses kegiatan praktik mahasiswa. Serta kami menerima kritik dan saran jika terdapat hal-hal yang belum sempurna, agar modul ini dapat digunakan dengan baik di kalangan mahasiswa maupun kalangan instruktur praktik.

Yogyakarta, 14 Januari
2022

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
1. Pengantar	4
2. Capaian Pembelajaran	4
3. Bahan Kajian	4
4. Tujuan Pembelajaran	4
5. Luaran	4
6. Prinsip Penangan Bencana (<i>Disaster Basic Principle</i>)	5
7. Pencegahan dan Mitigasi Pra Bencana, Kesiapsiagaan Bencana, Peta Rawat Bencana	9
8. Penugasan	18
9. Referensi	21

1. Pengantar

Mata kuliah ini memuat materi prinsip penanganan bencana dan pelaksanaan pencegahan/mitigasi bencana. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang mendukung untuk mencapai kompetensi. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Modul Praktik Manajemen Bencana Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan serta acuan bagi mahasiswa dan instruktur praktik, dalam melaksanakan kegiatan praktikum selama Semester Genap di Prodi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022. Modul praktik ini berisi tentang materi Konsep Dasar Manajemen Bencana.

2. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami tentang prinsip penanganan bencana dan pelaksanaan pencegahan/mitigasi bencana.

3. Bahan Kajian

- a. Prinsip penanganan bencana (disaster basic principle).
- b. Pencegahan/mitigasi pada pra bencana, kesiapsiagaan bencana, peta rawan bencana.

4. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami tentang prinsip penanganan bencana dan pelaksanaan pencegahan/mitigasi bencana.

- a. Peserta didik mampu memahami tentang Prinsip penanganan bencana (disaster basic principle).
- b. Peserta didik mampu memahami tentang Pencegahan/mitigasi pada pra bencana, kesiapsiagaan bencana, peta rawan bencana.

5. Luaran

- a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Prinsip penanganan bencana (disaster basic principle).
- b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Pencegahan/mitigasi pada pra bencana, kesiapsiagaan bencana, peta rawan bencana.

6. Prinsip Penangan Bencana (*Disaster Basic Principle*)

a. Prinsip Penanggulangan Bencana Nasional

a. Cepat dan tepat.

Dalam penanggulangan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas.

Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia.

c. Koordinasikan dan keterpaduan.

Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat.

e. Transparansi dan akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan transparansi pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan akuntabilitas berarti dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

f. Kemandirian.

Bahwa penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan bencana secara swadaya.

g. Nondiskriminasi.

Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

h. Nonproletisi.

Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

b. Prinsip Penanggulangan Bencana Internasional

a. SPHERE

1) Piagam Kemanusiaan

Dalam Bab Piagam Kemanusiaan SPHERE, secara ringkas piagam ini dapat dipahami sebagai point-point berikut:

- a) Komitmen lembaga-lembaga terhadap pemenuhan standar minimum dalam melakukan respon bencana.
- b) Berisi persyaratan paling mendasar bagi kelangsungan hidup dan martabat orang yang terkena dampak bencana.
- c) Memastikan Akuntabilitas upaya-upaya bantuan kemanusiaan.

Dan Piagam Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*) disusun berdasarkan 3 prinsip, yaitu:

- a) Hak untuk kehidupan yang bermartabat.
- b) Hak untuk perlindungan dan keselamatan.
- c) Hak untuk menerima bantuan kemanusiaan

Dimana dalam piagam ini ada penjelasan khusus tentang prinsip-prinsip khusus dalam konteks “konflik bersenjata”, tentang prinsip “pembedaan antara pemanggul senjata dan yang bukan”; dan “prinsip tidak mengusir paksa”.

2) Prinsip Perlindungan

Dalam suatu aksi kemanusiaan sebenarnya terdiri dari dua pilar utama, yaitu perlindungan dan bantuan. Prinsip Perlindungan dalam SPHERE adalah sebagai jawaban bahwa orang yang mendapat ancaman atau bahaya dalam suatu bencana atau konflik harus tetap mendapat perlindungan. Prinsip ini akan menjadi panduan bagi lembaga kemanusiaan bagaimana mereka menyelenggarakan perlindungan dalam

suatu aksi kemanusiaan. Ada empat prinsip perlindungan dasar dalam suatu aksi kemanusiaan dalam SPHERE, yaitu:

- a) Menghindari terjadinya bantuan kemanusiaan yang semakin menyengsarakan orang yang terkena dampak bencana.
- b) Memastikan setiap orang memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan yang proposional sesuai kebutuhan mereka tanpa diskriminasi.
- c) Melindungi orang yang terkena dampak bencana dari kekerasan secara fisik dan mental akibat adanya tindak kekerasan dan pemaksaan.
- d) Mendampingi orang yang terkena dampak bencana untuk menyuarkan hak-hak mereka dan memberikan akses penyembuhan atau rehabilitasi akibat dari suatu tindak kekerasan. Telah disepakati dalam klaster perlindungan global bahwa tiap lembaga kemanusiaan harus memiliki *focal point* untuk beberapa isu perlindungan dibawah ini, yaitu:

- a) Perlindungan anak
- b) Kekerasan berbasis gender
- c) Perumahan, tanah dan hak milik
- d) Aksi penambangan
- e) Peraturan tentang hukum dan peradilan

3) Standar-Standar Inti (*Core Standards*)

Sebelum membahas ke standar-standar minimum, kita harus melihat terlebih dahulu standar-standar inti dalam SPHERE. Standar ini ibaratnya yang memayungi standar-standar lainnya dalam SPHERE. Standar-standar ini terdiri dari enam point, yaitu:

- a) Aksi kemanusiaan yang berpusat pada orang yang terkena dampak bencana atau konflik.
- b) Koordinasi dan kolaborasi
- c) Pengkajian
- d) Desain dan respon

- e) Kinerja, transparansi, dan pembelajaran
- f) Kinerja pekerja kemanusiaan

Sama halnya dengan standar-standar minimum, *Core Standards* juga memiliki struktur sebagai berikut:

- a) *Core Standards* (Standar Inti), yaitu 6 point di atas yang merupakan ukuran kualitatif yang harus dicapai dalam suatu aksi kemanusiaan.
- b) *Key Actions* (Aksi Kunci), berisi aktivitas yang disarankan untuk mencapai standar.
- c) *Key Indicators* (Indikator Kunci), merupakan suatu sinyal atau tanda-tanda bahwa suatu standar telah tercapai. *Guidance Notes* (Catatan Panduan), menjelaskan tentang beberapa point penting yang harus dipertimbangkan dalam mencapai *Core Standards*, *Key Actions*, maupun *Key Indicators*.

b. CHS (*Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability*)

CHS adalah perangkat yang terdiri dari sembilan komitmen terhadap komunitas dan warga terdampak krisis yang menyatakan apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi dan perorangan yang menyampaikan bantuan kemanusiaan. Setiap komitmen didukung oleh sebuah kriteria mutu yang menandai bagaimana organisasi kemanusiaan dan staf harus bekerja untuk memenuhinya. Sembilan komitmen dan kriteria kualitas, yaitu:

- 1) Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2) Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan relevan.
- 3) Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat.
- 4) Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu.
- 5) Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan.
- 6) Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk.

- 7) Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada diri mereka.
- 8) Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi dan umpan balik.
- 9) Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan responsif.
- 10) Kriteria kualitas: Pengaduan disambut baik dan ditangani.
- 11) Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan saling melengkapi.
- 12) Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan saling melengkapi.
- 13) Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan yang lebih baik, karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi.
- 14) Kriteria kualitas: Pekerja kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri.
- 15) Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik.
- 16) Kriteria kualitas: staf didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan dengan adil dan setara.
- 17) Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis. Kriteria kualitas: sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggungjawab sesuai peruntukannya

7. Pencegahan dan Mitigasi Pra Bencana, Kesiapsiagaan Bencana, Peta Rawat Bencana

1. Pencegahan dan mitigasi pada pra bencana

a. Pengertian

UU No. 24 tahun 2007 menyatakan definisi pencegahan dan mitigasi.

Pencegahan adalah serangkaian pencegahan/mitigasi pada pra bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Definisi ini mirip dengan definisi dari UNISDR yang menyebutkan bahwa mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan dampak buruk dari ancaman. Mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk struktural (fisik), non struktural (perencanaan penggunaan lahan) dan pendidikan (kampanye kesadaran masyarakat) yang dilaksanakan untuk meminimalkan dampak merugikan dari kejadian-kejadian bahaya alam yang potensial timbul. Baik pencegahan maupun mitigasi dapat mengurangi risiko bencana. Bahkan pencegahan dapat mengurangi risiko hingga nol atau tidak ada bencana sama sekali. Sementara itu, mitigasi dapat mengurangi risiko secara signifikan karena kekuatan dan daya rusak ancaman berkurang. Singkatnya, pencegahan dan mitigasi berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap potensi ancaman.

Namun demikian perlu dicatat bahwa tidak semua ancaman dapat dicegah. Terdapat karakteristik ancaman tertentu yang hanya bisa dimitigasi namun tidak dapat dicegah, misalnya ancaman gempa bumi. Gempa bumi tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Namun dengan mitigasi yang baik maka dampak dari gempa bumi dapat diminimalisir.

b. Langkah Pencegahan dan Mitigasi

Langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan mitigasi secara khusus diarahkan pada ancaman yang ada dan kerentanan yang relevan dengan ancaman tersebut. Langkah langkah ini dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman, mengurangi dampak ancaman ataupun menghindari kerentanan (kondisi rentan) yang berhubungan ancaman tersebut.

Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi ancaman antara lain:

- Melakukan analisis/kajian ancaman

- Melakukan perencanaan pencegahan dan mitigasi.\
- Menentukan langkah pencegahan atau mitigasi yang bisa dilakukan.

H2M

Hilangkan (H) = semua upaya yang mungkin dilakukan untuk menghilangkan ancaman.

Hindari (H) = semua upaya menghindarkan masyarakat dari ancaman dengan cara menghilangkan kerentanan yang diakibatkan oleh adanya ancaman tersebut.

Mitigasi (M) = semua upaya untuk mengurangi dampak yang buruk dan merugikan dari sebuah ancaman, dilakukan dengan mengurangi kekuatan dan daya rusak ancaman.

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan. Non-fisik dapat berupa:

- 1) Pendidikan tentang bencana alam
- 2) Menempatkan Korban di suatu tempat yang aman menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu. Berbunyi: “Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”.

- 3) Membentuk tim penanggulangan bencana
- 4) Memberikan penyuluhan-penyuluhan
- 5) Merelokasi korban secara bertahap.

Antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi bencana berupa risiko bencana yaitu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko Bencana merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan suatu daerah. Sehingga bisa buat suatu rumusan yaitu $R = f \{ H \times V / C \}$ dimana:

R = Risiko

H (azard) = Bahaya

V (ulnerability) = kerentanan

C (apacity) = kemampuan

Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya untuk melindungi penghidupan (*livelihood*) dan asset individu dan masyarakat dari dampak bencana melalui kegiatan:

- 1) Pelibatan seluruh stakeholder
- 2) Melakukan penanggulangan bencana sesuai siklus bencana
- 3) Melakukan manajemen risiko bencana
- 4) Membuat strategi dalam pengurangan risiko bencana

2. Kesiapsiagaan Bencana

UU No. 24 tahun 2007, International Federation Red Cross (IFRC), dan UN - ISDR menyatakan bahwa kesiapsiagaan adalah segala upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai sumber. Secara keseluruhan, Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berupa sembilan aktivitas sebagai berikut (disertai contoh dengan ilustrasi anak sekolah) :

a. Pengukuran Awal

(Contohnya : anak mengenali kemampuan dan kesulitan belajarnya, waktu yang tepat untuk belajar, cara belajar yang efektif). Proses yang dinamis antara masyarakat dan lembaga yang ada untuk :

- 1) Melakukan pengukuran awal terhadap Risiko Bencana (bahaya dan kerentanan)
- 2) Membuat sumber data yang fokus pada bahaya potensial yang mungkin memberikan pengaruh
- 3) Mengantisipasi kebutuhan yang muncul dan sumber daya yang tersedia

b. Perencanaan

(Contohnya : anak memiliki rencana dan strategi untuk belajar)
Merupakan proses untuk :

- 1) Memperjelas tujuan dan arah aktivitas kesiapsiagaan
- 2) Mengidentifikasi tugas-tugas maupun tanggungjawab secara lebih spesifik baik oleh masyarakat ataupun lembaga dalam situasi darurat
- 3) Melibatkan organisasi yang ada di masyarakat (grassroots), LSM, pemerintahan lokal maupun nasional, lembaga donor yang memiliki komitmen jangka panjang di area yang rentan tersebut

c. Rencana Institusional

(Contohnya : anak melakukan belajar kelompok, cari sumber belajar lain, buat waktu belajar dan berjanji sama orang tua untuk menepatinya).

Koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara masyarakat dan lembaga yang akan menghindarkan pembentukan struktur kelembagaan yang baru dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan jaringan dan sistem.

- 1) Mengukur kekuatan dari komunitas dan struktur yang tersedia.
- 2) Mencerminkan tanggungjawab terhadap keahlian yang ada.
- 3) Memperjelas tugas dan tanggungjawab secara lugas dan sesuai.

d. Sistem Informasi

(Contohnya : selalu berhubungan dan tukar informasi dengan teman serta menguasai semua media untuk komunikasi)

- 1) Mengkoordinasikan peralatan yang dapat mengumpulkan sekaligus menyebarkan peringatan awal mengenai bencana dan hasil pengukuran terhadap kerentanan yang ada baik di dalam lembaga maupun antar organisasi yang terlibat kepada masyarakat luas.

e. Pusat Sumber Daya

(Contohnya : mempersiapkan bahan-bahan belajar, buku-buku dan catatan-catatan sekolah juga kemampuan mengakses sumber belajar seperti internet atau bertanya pada orang yang tahu misalnya saudara, orang tua atau guru).

- 1) Melakukan antisipasi terhadap bantuan dan pemulihan yang dibutuhkan secara terbuka dan menggunakan pengaturan yang spesifik. Perjanjian atau pencatatan tertulis sebaiknya dilakukan untuk memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan memang tersedia, termasuk :
 - a) Dana bantuan bencana
 - b) Perencanaan dana bencana
 - c) Mekanisme koordinasi peralatan yang ada
 - d) Penyimpanan

f. Sistem Peringatan

(Contohnya: membuat jadwal yang jelas untuk belajar sesuai jadwal ujian dan punya mekanisme yang jelas dengan teman teman untuk saling mengingatkan).

Harus dikembangkan sebuah cara yang efektif dalam menyampaikan peringatan kepada masyarakat luas meskipun tidak tersedia sistem komunikasi yang memadai. Sebagai pelengkap, masyarakat internasional juga harus diberikan peringatan mengenai bahaya yang akan terjadi yang memungkinkan masuknya bantuan secara internasional.

g. Mekanisme Respon

(Contohnya : mengenali respon terhadap tekanan akan ujian dan bagaimana mengatasinya, misalnya membuat manajemen stress yang baik).

Respon yang akan muncul terhadap terjadinya bencana akan sangat banyak dan datang dari daerah yang luas cakupannya sehingga harus dipertimbangkan serta disesuaikan dengan rencana kesiapsiagaan. Perlu juga dikomunikasikan kepada masyarakat yang akan terlibat dalam koordinasi dan berpartisipasi pada saat muncul bahaya.

h. Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Masyarakat

(Contohnya : mengikuti les tambahan atau belajar tambahan dan bergabung dengan lembaga bimbingan belajar).

Dari berbagai jenis program pengetahuan mengenai bencana, mereka yang terkena ancaman bencana seharusnya mempelajari dan mengetahui hal-hal apa saja yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan pada saat bencana tiba. Sebaiknya fasilitator program pelatihan dan pendidikan sistem peringatan ini juga mempelajari kebiasaan serta permasalahan yang ada di masyarakat setempat serta kemungkinan munculnya perbedaan/pertentangan yang terjadi dalam penerapan rencana.

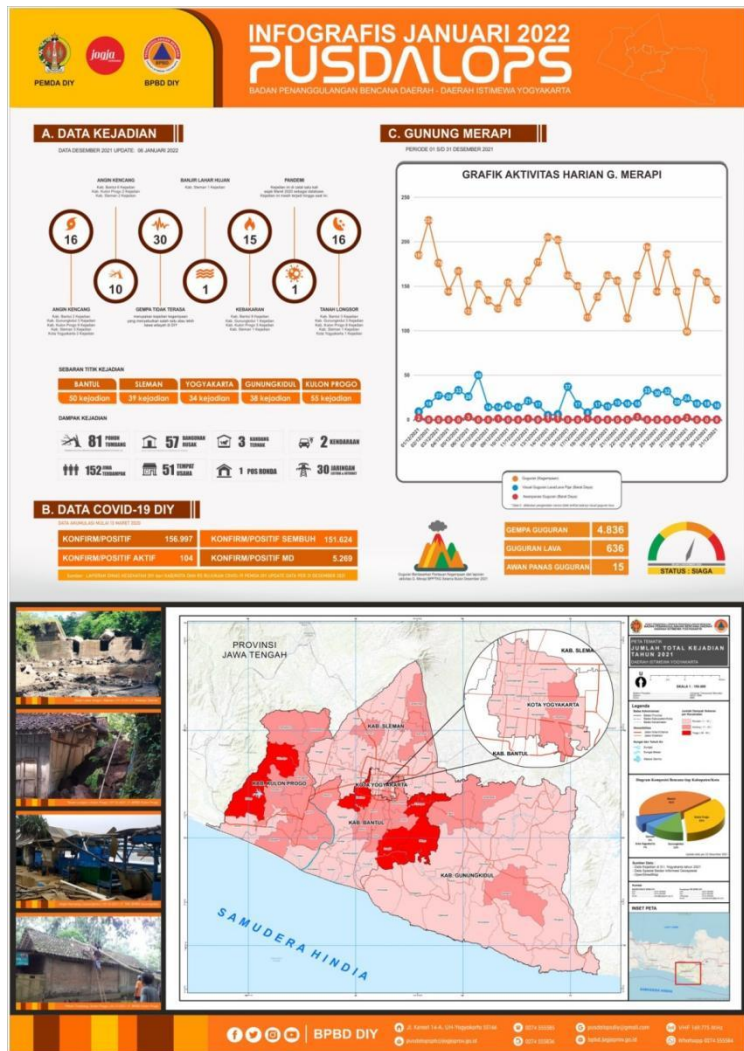
i. Praktek

(Contohnya: selalu berlatih dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru/dosen).

Kegiatan mempraktikkan hal-hal yang sudah dipersiapkan dalam rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dibutuhkan untuk menekankan kembali instruksi-instruksi yang tercakup dalam program, mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin muncul dalam rencana kesiapsiagaan tersebut. Selain itu, agar didapatkan informasi tambahan yang berhubungan dengan perbaikan rencana tersebut.

3. Peta Rawan Bencana

Peta Rawan Bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, maupun bencana alam lainnya. berbeda dengan peta rupa bumi pada yang menyajikan informasi topografis dan batas administratif, Peta rawan bencana berupa peta yang menyajikan satu atau sejumlah informasi tematik. Pembuatan peta rawan bencana merupakan salah satu aspek dari mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Fungsi peta rawan bencana di antaranya adalah untuk menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena dampak bencana. Selain itu peta rawan bencana akan menyediakan berbagai informasi tentang masalah kebencanaan pada satu wilayah sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Peta rawan bencana dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan frekuensi kejadian bencana.



Gambar 1 Gambar. Infografis Januari 2022 BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Penugasan

a. Tugas 1

- 1) Mahasiswa mengerjakan soal pilihan ganda di bawah ini dengan cara menandai dengan diberi tanda silang pada pilihan yang telah disediakan.
 - 2) Pengampu dan mahasiswa mendiskusikan bersama untuk membahas dan mendapatkan jawaban yang benar dan tepat.
1. Penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan bencana secara swadaya. Pernyataan tersebut merupakan prinsip dari manajemen bencana, yaitu....
 - A. Berdaya guna dan berhasil guna.
 - B. Kemandirian**
 - C. Prioritas
 - D. Koordinasikan dan keterpaduan.
 - E. Nonproletisi
 2. Berikut ini merupakan prinsip penanggulangan bencana nasional yaitu, kecuali....
 - A. Nondiskriminasi
 - B. Transparansi dan akuntabilitas
 - C. Koordinasikan dan keterpaduan
 - D. SPHERE**
 - E. Cepat dan tepat
 3. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum. Pernyataan tersebut merupakan prinsip dari penanggulangan bencana, yaitu....
 - A. Nonproletisi
 - B. Cepat dan tepat
 - C. Transparansi dan akuntabilitas**
 - D. Nondiskriminasi
 - E. Koordinasikan dan keterpaduan
 4. Berikut merupakan prinsip perlindungan dasar dalam suatu aksi kemanusiaan dalam SPHERE yaitu, kecuali....

- A. Memberikan akses penyembuhan atau rehabilitasi bagi orang yang terkena dampak bencana.
 - B. Menghindari terjadinya bantuan kemanusiaan yang semakin menyengsarakan orang yang terkena dampak bencana.
 - C. Memastikan setiap orang memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan yang proposional sesuai kebutuhan mereka tanpa diskriminasi.
 - D. Melindungi orang yang terkena dampak bencana dari kekerasan secara fisik dan mental akibat adanya tindak kekerasan dan pemaksaan.
 - E. Mendampingi orang yang terkena dampak bencana untuk menyuarakan hak-hak mereka dan memberikan akses penyembuhan atau rehabilitasi akibat dari suatu tindak kekerasan.
5. Perangkat yang terdiri dari sembilan komitmen terhadap komunitas dan warga terdampak krisis yang menyatakan apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi dan perorangan yang menyampaikan bantuan kemanusiaan adalah....
- A. *Guidance Notes*
 - B. *Humanitarian Charter*
 - C. SPHERE
 - D. *Core Standards*
 - E. CHS (*Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability*)
6. Apa saja bentuk dari mitigasi bencana?
- A. Struktural, non struktural, pendidikan
 - B. Fisik, perencanaan, pendidikan
 - C. Struktural, hindari, non struktural
 - D. Struktural, non struktural, pengukuran awal
 - E. Non struktural, kampanye, hindari
7. Apa yang dimaksud dengan semua upaya yang mungkin dilakukan untuk menghilangkan ancaman?
- A. Mitigasi
 - B. Hilangkan
 - C. Hindari
 - D. Bencana

- E. Perencanaan
8. Apa aspek kesiapsiagaan bencana yang meliputi kegiatan mempersiapkan bahan-bahan belajar, buku-buku dan catatan-catatan sekolah juga kemampuan mengakses sumber belajar seperti internet atau bertanya pada orang yang tahu misalnya saudara, orang tua atau guru?
- A. Pengukuran Awal
 - B. Perencanaan
 - C. Pusat Sumber Daya
 - D. Rencana Institusional
 - E. Sistem Informasi
9. Apa yang termasuk kegiatan dalam upaya untuk melindungi penghidupan (livelihood) dan aset individu dan masyarakat dari dampak bencana?
- A. Melakukan penanggulangan bencana sesuai siklus bencana
 - B. Memperjelas tugas dan tanggungjawab secara lugas dan sesuai
 - C. Mengkoordinasikan peralatan
 - D. Memperjelas tujuan dan arah aktivitas kesiapsiagaan
 - E. Melakukan pengukuran awal terhadap Risiko Bencana
10. Apa saja variabel yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan peta rawan bencana?
- A. jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan luas wilayah
 - B. keparahan, tingkat kepadatan, dan luas wilayah
 - C. jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan frekuensi kejadian bencana
 - D. keparahan, tingkat kepadatan, dan frekuensi kejadian bencana
 - E. jumlah penduduk, keparahan, luas wilayah

Penilaian:

Dinilai secara kualitatif dengan *range* nilai dari 0 sampai 100.

9. Referensi

Husein, Ahmad dan Aidil Onasis. 2017. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

_____. 2017. *Modul Konsep Dan Karakteristik Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*. Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi.

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. 2017. *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana*. Diakses dari

https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/03/6e01a_02._Modul_2_Manajemen_Penanggulangan_Bencana.pdf (diakses tanggal 15/02/2022).

Kementrian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2016. *Bahan Pembelajaran Pencegahan Dan Mitigasi*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2017/12/HANJAR-PENCEGAHAN-DAN-MITIGASIREVISIutk-PDF.pdf> (diakses tanggal 15/02/2022).

Bencanapedia. 2010. *Daerah Rawan Bencana*. Diakses dari http://bencanapedia.id/Daerah_Rawan_Bencana (diakses tanggal 15/02/2022).

BPD DIY. 2022. *Info Kejadian Grafis 2022*. Diakses dari <http://bpbd.jogjaprovo.go.id/infografis> (diakses tanggal 15/02/2022).

1. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampuan	Tanda tangan pengampu
1				

Nilai Akhir: _____

Pengampu,